



# Anggaran Pemeliharaan Terbatas, Kualitas Jalan Tidak Maksimal

Gianyar (Bali Post) -

Infrastruktur berupa jalan memiliki fungsi strategis dalam pembangunan daerah. Pemeliharaan jalan dilaksanakan sebagai usaha mempertah-ankan daya dukung dan layak fungsi jalan yang nyaman dan aman bagi pengguna jalan agar kegiatan khususnya transportasi yang menunjang perekonomian dapat berjalan dengan baik. Namun lantaran keterbatasan anggaran, kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Gianyar belum bisa dilakukan maksimal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gianyar, I.B. Sudewa, Selasa (7/7) kemarin, mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir sejatinya pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kualitas jalan. Misalnya, jalan kabupaten yang dulunya aspal lapen sekarang telah dihotmix. Namun diakunya, belum semua jalan yang berkategori jalan kabupaten di Gianyar telah dihotmix. "Belum semua, tapi sudah sebagian besar," katanya.

Gus Sudewa mengungkapkan, saat ini kondisi jalan kabupaten di Gianyar sekitar 70 persennya dalam kondisi baik. Sementara sisanya dalam kondisi sedang. Dia berdalih, tidak ada jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak berat. Untuk itulah, saat ini Pemkab Gianyar tengah fokus melakukan kegiatan pemeliharaan khususnya pelapisan pada jalan.

Pemkab Gianyar sendiri me-

nargetkan seluruh ruas jalan kabupaten di Gianyar dalam kondisi baik dalam 2,5 tahun ke depan. Untuk diketahui, ruas jalan kabupaten di Gianyar mencapai 555,538 kilometer. "Rencananya, diharapkan pada sisa masa jabatan bupati ini bisa tuntas semuanya," katanya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di Gianyar tidak bisa dilakukan serta merta. Gus Sudewa mengatakan hal ini mengingat kemampuan pendanaan dari APBD Kabupaten Gianyar belum sebanding dengan panjang ruas jalan yang harus ditangani. Tidak hanya jalan kabupaten, melainkan juga jalan lingkungan/desa yang sekitar 1.086 kilometer.

Masih menyangkut anggaran, di APBD induk 2015, Pemkab Gianyar mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar. Anggaran itu tidak hanya untuk jalan kabupaten melainkan juga untuk jalan desa/lingkungan. Total panjang jalan yang akan ditangani dengan dana tersebut sekitar 40 kilometer.

"Anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dalam setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan pendanaan dalam APBD," tambah Gus Sudewa.

Bagaimana dengan trotoar? Gus Sudewa mengatakan, fokus pemerintah masih dalam rangka pemeliharaan. Sejauh ini belum ada perencanaan untuk melakukan peningkatan kualitas. (kmb25)

Edisi

: Rabu, & Juli Zo15

Hal

: 11





# Dugaan Bagi-bagi UP PBB

# Lagi, Empat Pejabat Diperiksa

Bangli (Bali Post)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli terus mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan upah pungut pajak bumi dan bangunan (UP PBB). Setelah memeriksa empat pejabat aktif dan seorang mantan Sekda Bangli Senin (6/7) lalu, pada Selasa (7/7) kemarin jaksa kembali memeriksa empat pejabat lainnya.

Adapun empat pejabat yang diperiksa kemarin yakni mantan Kadispenda yang kini Asisten II AA Alit Darmawan, mantan Kabag Hukum yang kini Kadishubkominfo Gede Arta, Kasubag Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Pasedahan Agung serta mantan Asiten III.

Kepala Kejari Bangli Ida Ayu Retnasari saat dikonfirmasi mengatakan bahwa materi pemeriksaan kemarin masih seputar arah aliran dana upah pungut. Dimana aliran upah pungut PBB diduga sempat diterima oleh sejumlah pejabat yang tidak berhak. "Materi pemeriksaannya masih seputaran itu," ujarnya. Retnasari juga mengatakan sejauh ini pihaknya belum menetapkan satu pun tersangka. Sebab saat ini Kejari Bangli masih melakukan pengumpulan data.

Sebelum menetapkan tersangka pihaknya masih harus mengkaji keterangan-keterangan yang disampaikan saksi saat pemeriksaan. Sementara itu Kadispenda Gede Suryawan saat ditemui kemarin menjelaskan, sesuai dengan SK Bupati Bangli No. 977/153/2011 tentang alokasi pembagian biaya pemungutan PBB Pertambangan kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, diakuinya ada sejumlah pejabat yang menerima biaya pemungutan PBB Pertambangan itu. Sesuai SK tersebut pembagiannya dilakukan sesuai prosentase.

Dipaparkan Suryawan, dalam pembagian itu Bupati Bangli menerima jatah 4 persen dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan. Sementara Wakil Bupati mendapatkan bagian 3,5 persen. Selain itu Sekretaris Daerah juga mendapatkan jatah 3 persen, Kadispenda 3 persen, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar 1,85 persen. Pembagian itu untuk pejabat.

Pembagian itu untuk pejabat.
Sedangkan untuk staf teknis bagiannya diatur berbeda, disesuaikan dengan jabatannya. Dimana untuk pejabat setingkat Sekretaris dan Kabid diberikan jatah 11,92 persen dari total biaya pemungutan. Selain itu Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubag juga

mendapatkan jatah masing-masing 21,72 persen. Staf golongan III mendapatkan 12,72 persen, staf golongan II mendapatkan 34,29 persen dan tenaga honorer, harian serta kontrak mendapatkan 4 persen.

4 persen.

"Tapi jumlah itu dibagi-bagi.
Untuk kasi dan kasubag misalnya, karena jumlahnya ada sekitar 15 orang, maka bagian 21,72 persen itu dibagi untuk 15 orang," terangnya.

Dikatakan mantan Kepala Inspektorat ini, SK Bupati Bangli tentang alokasi pembagian biaya pemungutan PBB Pertambangan kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli itu ditetapkan sejak 26 September 2011

Namun, karena kemudian muncul banyak pemberitaan mengenai persoalan kasus upah pungut di Kabupaten Subang dan Buleleng, maka Bupati Bangli Made Gianyar akhirnya memutuskan untuk mencabut SK tersebut melalui SK No. 973/264/2012. "Dicabutnya per 20 November 2012," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Pabu, & Juli 2015
Hal : 16





# Kasus Korupsi Dana Hibah

# Banding, PT Turunkan Hukuman Pramono

Denpasar (Bali Post) -

Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar yang menerima banding atas vonis dua tahun kasus dugaan korupsi bansos panyengker pura, menurunkan hukuman terdakwa Ngakan Putu Tirta Pramono. Hukuman yang diberikan di tingkat banding itu turun dari dua tahun menjadi satu tahun. Informasi itu dibenarkan Kasipidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahardi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/7) kemarin.

Selain hukuman fisik selama setahun, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan. Jaksa penuntut umum (JPU) dari Gianyar sudah menerima pemberitahuan dari PT Denpasar. "Tetapi salinan putusan masih harus menunggu," sebutnya.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpinan Achmad Peten Sili menjatuhkan hukuman dua tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. Pramono sebelumnya diajukan ke persidangan atas dugaan korupsi dana hibah pembangunan Pura Dadia Pulasari Keliki dan Pura Dadia Cameng Keliki. Saat itu, dana hibah dari Pemkab Gianyar Rp 50 juta untuk tiap Dadia, dipotong masingmasing Rp 45 juta hingga menyebabkan kerugian negara Rp 90 juta. (kmb37)

Edisi : Rabu. 8 2011 2015

Hal : 3





# Ngaku Jadi Korban Politik Terdakwa Korupsi Raskin Menangis

Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan saksi-saksi atas kasus dugaan korupsi bantuan beras miskin (raskin) dengan tedakwa Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra, sudah selesai. Selasa (7/7) kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) Herdian Rahardi mengagendakan pemeriksaan terdakwa. Saat diperiksa itulah tedakwa menangis sesenggukan dan mengaku hanyalah menjadi korban politik di kampungnya.

Dalam sidang yang dipimpin Acmad

Dalam sidang yang dipimpin Acmad Peten Sili itu, terdakwa memberi alasan menjadi korban politik karena pamannya kalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Malinggih. Sementara hakim langsung melayangkan pertanyaan yang menohok terkait penjualan raskin pada 2013 silam. Terdakwa awalnya membantah menjual 43 karung raskin itu dan mengatakan jika beras tersebut hanya dititipkan di warung.

Hakim tidak begitu saja percaya sehingga dikejar dengan berbagai alibi, sehingga terdakwa terpojok dan akhirnya mengakui bahwa raskin dititipkan di warung untuk dijual. "Tetapi saya ada perjanjian lisan kalau ada masyarakat yang mau mengambil beras miskin bisa mengambil di warung dengan harga biasa," elak tedakwa.

Disebutkannya, 43 karung beras berisi

Disebutkannya, 43 karung beras berisi 15 kilogram yang dijual tersebut merupakan sisa beras miskin dari bulan Januari hingga Juli 2013. Alasannya, selain karena dia sudah menalangi pembayaran beras tersebut ke Bulog, kantor desa sedang dalam perbaikan. Makanya, beras tersebut dibawa ke rumah dan akhirnya dititipkan di warung untuk dijual.

Di akhir pemeriksaan, majelis hakim menanyai terdakwa, apakah menyesali perbuatannya. Saat inilah terdakwa langsung menangis sesenggukan sambil mengakui kesalahannya. "Saya salah, saya minta maaf," katanya dengan berurai air mata. (kmb37)

Edisi : Rabu & DVIII 2015

Hal : 3





## Tingkatkan Pelayanan Publik

hingga ke Tingkat Kecamatan

# Bupati Gde Agung Pantau Proyek Fisik di Badung Utara

BUPATI Badung A.A. Gde Agung, Selasa (7/7) kemarin, meninjau sembilan proyek fisik yang dianggarkan melalui APBD Badung Tahun 2015. Proyek yang ditinjau bupati bersama rombongan SKPD ini sebagian besar berada di kecamatan, khususnya Badung Utara. Pembangunan ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan.

Dalam pemantauannya yang didampingi Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Kepala Bappeda Badung I Wayan Suambara dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Badung, Gde Agung meminta rekanan agar mengutamakan kualitas. Selain kualitas, penggarap proyek juga diminta memperhatikan waktu pengerjaan. Sebab, proyek yang saat ini berlangsung dihadapkan pada dua hari besar keagamaan, yaitu Galungan dan Idul Fitri. Dua hari besar keagamaan ini diyakini akan berimbas pada target penyelesaian, karena sebagian besar tenaga kerjanya mudik Lebaran.

"Saya minta rekanan benarbenar memperhatikan kualitas dan waktu pengerjaan. Saya tidak mau rekanan terlalu berpuas diri baru ada deviasi plus. Karena, biasanya finishing makan waktu banyak," pesan Gde Agung saat memantau pembangunan gedung Arsip di kawasan Puspem Badung, kemarin. Adapun sembilan proyek yang

Adapun sembilan proyek yang ditinjau, pertama pembangunan gedung aset di Puspem Badung. Proyek ini menyedot dana Rp 4.08 miliar. Kemudian, proyek gedung paviliun Mangusada atau gedung E RSUD Badung. Masih di Mengwi, bupati juga

meninjau peningkatan saluran irigasi Subak Tangkub, Mengwi dengan nilai kontrak Rp 856 juta dan pembangunan kantor Camat Mengwi dengan nilai kontrak Rp 7,4 miliar.

Di Kecamatan Abiansemal, bupati memantau tiga proyek fisik. Masing-masing gedung Puskesmas I Abiansemal, pembangunan RKB dan ruang kepala sekolah SD No. 2 Blahkiuh dan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Taman Mumbul Desa



PROYEK - Bupati Badung A.A. Gde Agung, Selasa (7/7) kemarin, meninjau sembilan proyek fisik yang dianggarkan melalui APBD Badung Tahun 2015. Proyek-proyek yang ditinjau bupati tersebut sebagian besar berada di wilayah Badung Utara.

Edisi : pabo

: Raby, 8 Juli 2015

Hal

7





Samburgan - -

Sangeh. Di proyek Puskesmas I Abiansemal, Gde Agung berkalikali mengingatkan rekanan agar menjaga kualitas dan bisa selesai tepat waktu. Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini bahkan memberikan "ultimatum" kepada rekanan bahwa proyek yang ia garap adalah proyek model rumah sakit yang sangat berbeda dengan proyek-proyek lain. "Proyek ini sama dengan membangun gedung rumah sakit. Saya tidak mau ada yang mengelupas, apalagi retak," kata Gde Agung.

Bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 Agustus ini bahkan minta komitmen rekanan bahwa yang bersangkutan benar-benar sanggup menyelesaikan pembangunan Puskesmas ini. "Sanggup kamu mengerjakan proyek ini? Jangan puas diri dulu baru ada deviasi plus 4 persen, karena yang berat itu adalah saat finishing-nya," tegas bupati.

Sementara di Kecamatan

Sementara di Kecamatan Petang, bupati bersama rombongan meninjau proyek pembangunan Kantor Camat Petang dan Pembangunan Gedung Klinik Ibu dan Anak Puskemas Petang I. Rata-rata dari 9 proyek semua mampu melampui target. Proyek sendiri sebagian besar

digarap dengan waktu 180 hari kalender.

Bupati Gde Agung di selasela kunjungan menegaskan, kunjungan ini adalah kunjungan terakhir menjelang berakhir masa jabatannya, 5 Agustus mendatang. Sebelum purna tugas, ia mengaku ingin memastikan bahwa semua proyek yang dirancang berjalan dengan baik. "Ini sebagai bagian dari tupoksi saya. Saya ingin memastikan dan memonitor proyek-proyek yang ada di Badung Utara," ujarnya.

Dikatakannya, dari sembilan proyek yang dikunjungi, sebagian besar adalah proyek yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti pembangunan kantor camat, RSUD dan Puskesmas. Selain itu, juga ada dua proyek yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penambahan destinasi wisata. Seperti pembangunan gedung aset dan pembangunan daya tarik wisata Taman Mumbul di Sangeh. "Sebagian besar pembangunan memang berkaitan dengan pelayanan publik, karena tahun ini memang kita rancang sebagai tahun pelayanan," pungkas Gde Agung. (ad554)

Edisi : <u>Rabu, 8 Juli 2015</u>
Hal : 2